BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia lahir dari berbagai macam suku bangsa. Keberagaman suku bangsa di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk atau negara beraneka ragam suku, bangsa dan agamanya tentunya berpengaruh akan banyaknya variasi budaya. setiap suku di Indonesia memiliki adat budaya tersendiri.¹ Salah satu yang paling menonjol adalah yaitu Hukum adat, hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah yang berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi masyarakat tersebut.²

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia. Hukum Adat sebenarnya tidak bersumber dari peraturan-peraturan, tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu dalam kehidupan masyarakat tradisional banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku maka dari itu nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertingkah laku yang

¹ Budiono, 2021, **Urgensi Pendidikan Multikultural Dalam Pengembangan Nasionalisme Indonesia**, Jurnal Civic Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Volume 6 Nomor 1, P-ISSN: 2623-0216 E-ISSN:2623-0224, Hal. 79.

² Asliani Harahap, 2018, **Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat**, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 4 Nomor 2, ISSN: 2442-6024, e-ISSN: 2442-7063, Hal. 2.

sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada pada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b ayat 2 yang berbunyi "negara mengakui satu kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".³

Setiap orang butuh tempat tinggal, Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar yang dapat diberikan macam-macam hak pada tanah tersebut. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Dimana tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi merupakan suatu sarana produksi yang akan mendatangkan kesejahteraan. Kedua secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Ketiga sebagai kapita budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, bermakna sakral karena pada akhir hayatnya setiap orang akan kembali ketanah. Makna yang multi dimensional tersebut cenderung bahwa orang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun

³ Jenuarani Artha Adinda Putri, 2022, **Pelaksanaan Hukum Adat Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan**, Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 7 Nomor 1, ISSN: 2528-0767, E-ISSN: 2527-8495, Hal. 210.

apabila hak-haknya dilanggar.⁴ Karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan diantaranya Rakyat berhadapan dengan birokrasi, Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta dan Konflik antara rakyat.⁵

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Menurut Christopher Moore memberikan batasan tentang pengertian mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa/negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁶

⁴ Marsela, 2015, **Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional**, Jurnal Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Volume 2 Nomor 2, ISSN: 2355-987X, Hal. 1-2.

⁵Muhamad Rasyad, 2019, **Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam**, Jurnal soumatara law review, Volume 2 Nomor 1, E-ISSN: 2620-5904, Hal. 136

⁶ *Ibid*, Hal. 137.

Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Flores yang sebagian besar orang berprofesi sebagai petani sehingga sangat erat kaitannya dengan tanah, hampir setiap hari berhubungan dengan tanah, seiring perkembangan jaman dan bertambahnya populasi manusia sehingga kebutuhan akan tanah sangat meningkat sementara jumlah tanah relatif tetap, sehingga banyak terjadi konflik di masyarakat mengenai tanah baik itu yang berukuran kecil maupun dalam ukuran besar dan masyarakat adat di kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur lebih memilih penyelesaian sengketa tanah secara adat melalui mediasi yang dipimpin langsung oleh kepala adat karena mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa non litigasi dan lebih mudah serta tidak butuh biaya seperti proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Adapun instansi yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan tanah tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu instansi pemerintahan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab dalam menangani segala sengketa pertanahan, mengingat bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada diperlukan pengumpulan data administratif yuridis dan fisik melalui suatu penelitian, dalam suatu mekanisme dan tatacara penanganan masalah pertanahan yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Badan Pertanahan Nasional menetapkan aturan tentang cara penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dalam Pasal 6 disebutkan mengenai penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: pengkajian Kasus, Gelar awal, Penelitian, ekspos hasil Penelitian, Rapat Koordinasi, Gelar akhir, dan Penyelesaian Kasus. Penyelesaian kasus sengketa pertanahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dan dapat dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional (*non-litigasi*). Namun dalam sengketa yang terjadi khususnya di daerah Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur penanganan sengketa dan konflik mengenai pertanahan tidak cukup menggunakan peraturan tersebut, yang dimana dalam penyelesaiannya juga menggunakan penyelesaian sengketa secara adat yang dilakukan oleh Ketua Adat di manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-Undang Desa) berupaya mengatur tentang desa dan masyarakat hukum adat. Undang-Undang desa ingin mengembalikan hak asal usul yang melekat pada desa adat untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan wilayah masyarakat hukum adatnya (hak ulayat). Undang-Undang Desa mengakomodir desa dan hak asal-usul tersebut melalui pengaturan desa adat. Desa adat dalam Undang-Undang Desa mempunyai peluang dalam menjawab persoalan hak-hak masyarakat hukum adat, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Desa Adat sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat Desa adat dalam Undang-Undang Desa adalah pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan, yaitu menetapkan unit sosial masyarakat hukum adat seperti nagari, huta, kampung, mukim dan lain-

lain sebagai badan hukum publik. Desa adat sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan hak asal usul (pasal 103), yaitu :

- a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli atau dengan kata lain pemerintahan berdasarkan struktur dan kelembagaan asli, seperti nagari, huta, marga dan lain-lain.
- b) Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat,
- c) Pelestarian nilai sosial dan budaya adat,
- d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat yang selaras dengan Hak Asasi Manusia,
- e) Penyelenggaraan sidang perdamaian desa adat yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,
- f) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat,
- g) Pengembangan kehidupan hukum adat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang sengketa tanah ini dengan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 **Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yaitu agar permasalahan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Dalam penulisan ini, ruang lingkup permasalahannya hanya untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 **Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus memahami suatu kejadian, mencari latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pikiran dan pemecahan.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikirannya secara tertulis.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
4. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
5. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
6. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa Di Kabupaten Manggrai Barat Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah Di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang dapat di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan di bandingkan dengan standar ukuran yang telah di tentukan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, yang di maksud dengan penelitian hukum adalah Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.⁸

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penulisan skripsi, hal ini di karenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka penelitian tersebut harus di lakukan secara sistematis,teratur,dan didukung oleh data yang lengkap.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁹

⁷ Suharsimi Arikunto, 2002, **prosedur penelitian suatu pendekatan praktek**, Jakarta, Rineka Cipta ,hal.126-127.

⁸ Soerjono Soekanto, 1981, **Pengantar penelitian Hukum**, Jakarta,UI Press, hal.43.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986 **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Penelitian hukum empiris, atau Disebut Dengan Penelitian Lapangan Yaitu Mengkaji Ketentuan Hukum Yang Berlaku Serta Apa Yang Terjadi Dalam Kenyataannya Dalam Masyarakat. Penelitian Yuridis Empiris Dalam Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menjawab Isu Hukum Berkaitan Dengan Bagaimana Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.¹⁰

5.1.2 Jenis pendekatan

Dilihat Dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peran kepala adat di kabupaten manggarai barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang melihat gejala-gejala dan perilaku serta peran kepala adat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di wilayah kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.5.3 Sumber Data

Menurut Rooney Hanitijo Soemitro, sumber data ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier.¹¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi, 2014, **Penelitian Huku (Legal Research)**. Jakarta: sinar Grafika, hal.110.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, Mandar Maju, hal.11.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu kepala adat manggarai untuk mencari informasi mengenai bagaimana Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹² Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang agraria
- 3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; buku, jurnal ilmiah,

¹² *Ibid*.hal.25.

artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Data tersier

Data tersier, yaitu data yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedia.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data. Pada kegiatan tersebut penulis melakukan pengamatan atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

b. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara yaitu dengan mempergunakan Teknik Wawancara atau interview yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara atau tatap muka. Dengan Teknik yang demikian maka data yang di peroleh valid, yang dapat diuji dan diakui kebenarannya. Wawancara ini di lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

1.5.5 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan penerapan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Adapun metode analisis data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder dalam skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, klasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.¹³

1.6 Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, Ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan

¹³ Bambang Waluyo, 1996, **Penelitian Hukum dalam praktek**, Cet.II, Jakarta, Sinar Grafika, hal.77

BAB II Kajian Teoritis

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas.

BAB III peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama yaitu bagaimana peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB IV Faktor-faktor yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini menguraikan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan sasaran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang di peroleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.